

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
BAGI KELUARGA MISKIN
(Studi pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran
2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri)**

Diana Titin Nurhartatik, Mardiyono, Minto Hadi

Jurusan Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: diana.didot@yahoo.com

Abstract: *Policy Implementation on the Implementation of Education for the Poor (Studies in Perwali No. 27 of 2011 and Perwali No. 19 of 2012 on Implementation Guidelines of Students Admission through poor student entrance in Academic Year 2012/2013 in State Senior High school 7 Kediri). Kediri government issued a policy in providing education for the poor contained in Perwali No. 27 of 2011 and Perwali No. 19 in 2012 which there are chapters about the poor students to obtain same education and State Senior High school 7 Kediri is one of the schools that implement the policy. The research focuses are (1) the implementation of education policies for the poor based on Perwali No. 27 of 2011 and Perwali Number 19 Year 2012 on Implementation Guidelines of Students Admission through poor student entrance in Academic Year 2012/2013 in State Senior High school 7 Kediri, and (2) The supporting and inhibiting factor affecting the implementation of education policies for the poor. This study used descriptive qualitative approach, research has shown that the implementation of education policies for the poor in academic year 2012/2013 in State Senior High school 7 Kediri has been run well. There are 60 students from poor family accepted in State Senior High school 7 Kediri. In academic year 2012/2013 Pure Participation Number (APM) in senior and junior high school was increased, especially in senior high school, there is no drop out report just because of economic factor.*

Keywords: *policy implementation, education, the poor students*

Abstrak: **Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Keluarga Miskin (Studi Pada Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Jalur Siswa Miskin Tahun Ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri).** Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan Perwali Nomor 27 tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 tahun 2012 yang di dalamnya terdapat pasal mengenai siswa miskin yang bertujuan pemerataan pelayanan pendidikan. SMA Negeri 7 merupakan salah satu sekolah yang melaksanakan kebijakan tersebut. Fokus penelitian (1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin berdasarkan perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri, (2) Faktor pendukung dan penghambat yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, penelitian menunjukkan implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri berjalan dengan baik. Sebanyak 60 siswa miskin diterima di SMA Negeri 7 Kediri. Tahun ajaran 2012/2013 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA meningkat. Khususnya untuk jenjang SMA/SMK/MA tidak ada laporan siswa putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi.

Kata kunci: *implementasi kebijakan, penyelenggaraan pendidikan, siswa miskin*

Pendahuluan

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa salah satu

tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan setiap

warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender. menurut Soyomukti (2008, h.19), Pendidikan adalah persemaian ideologi dan pemikiran, suatu landasan yang digunakan untuk membangun bangsa. Berdasarkan penjelasan tersebut, pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam mempersiapkan manusia yang berkualitas bagi pembangunan negara.

Perbaikan mutu pendidikan dalam berbagai jenis dan jenjang oleh pemerintah merupakan usaha yang dilakukan mengingat begitu pentingnya peranan pendidikan. Dengan dikeluarkannya Program pendidikan nasional yang mewajibkan sekolah sampai 9 tahun dan akan menjadi wajib 12 tahun diharapkan mutu pendidikan masyarakat menjadi semakin meningkat. Namun, faktanya masih terdapat siswa putus sekolah. Dari beberapa persoalan yang menyebabkan anak putus sekolah, persoalan ekonomi merupakan penyebab utama anak putus sekolah. Biaya pendidikan yang mahal menyebabkan masyarakat tidak mampu memenuhi biaya pendidikan. Sehingga diperlukan jalan keluar guna mengurangi jumlah anak putus sekolah.

Untuk mengatasi berbagai macam persoalan penyebab anak putus sekolah, Negara dalam hal ini pemerintah sudah berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat untuk mengurangi jumlah anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi atau biaya pendidikan. Upaya pemerintah dalam mengatasi persoalan anak putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi atau biaya pendidikan diwujudkan dengan memberikan beberapa bantuan.

Pertama, Program BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. La Ode Amaludin (2007). Kedua, BKM (Bantuan Kesejahteraan Murid). Program BKM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat keluarga kurang/tidak mampu akan layanan pendidikan jenjang Sekolah Lanjutan Atas dan yang sederajat (SLA dan sederajat). Ketiga, Program BSM (Bantuan Siswa Miskin) adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada siswa dari keluarga kurang mampu untuk dapat melakukan kegiatan belajar di sekolah.

Berbagai bantuan yang diberikan pemerintah untuk mengatasi masalah pendidikan agar dapat diterima seluruh masyarakat Indonesia didukung dengan adanya Undang-Undang mengenai Otonomi Daerah. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah tersebut, maka setiap daerah berhak menentukan arah kebijakannya masing-masing yang disesuaikan dengan kondisi daerahnya, termasuk kebijakan publik dalam bidang pendidikan.

Tahun 2011 Pemerintah Kota Kediri mengeluarkan kebijakan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan pendidikan kepada seluruh masyarakat Kota Kediri. Bantuan tersebut diimplementasikan dengan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin yang tertuang dalam Perwali Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK Di Kota Kediri dan Perwali Nomor 19 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di Kota Kediri. Poin pertama di Bagian Kelima Pasal 27 mengenai siswa miskin dituliskan bahwa TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK wajib mengalokasikan jumlah siswa miskin yang diterima sebanyak 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh siswa yang diterima.

Kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri dilatarbelakangi oleh kondisi pendidikan di Kota Kediri berdasarkan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Kediri tahun anggaran 2008,

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SD/MI tahun 2004 sebesar 123,94%. Tahun 2007 sebesar 123,35%, tahun 2008 sebesar 120,09%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SMP/MTs tahun 2004 sebesar 97,82%, tahun 2007 95,03% dan tahun 2008 sebesar 92,10%. Angka Partisipasi Murni (APM) untuk jenjang pendidikan SMA/MA/SMK tahun 2004 sebesar 107,18%, tahun 2007 sebesar 107,00% dan tahun 2008 sebesar 56,62%. Dari data mengenai Angka Partisipasi Murni (APM) tersebut pada tahun 2008 untuk siswa jenjang pendidikan SMP siswa putus sekolah sebesar 7,29%. Siswa jenjang pendidikan SMA/MA/SMK yang putus sekolah sebesar 43,38%. Penyebab utama kurangnya angka partisipasi murni (APM) dimana masih terdapat siswa yang putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi atau biaya pendidikan. LKPJ Walikota Kediri (2008).

Salah satu sekolah yang mengimplementasikan Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin adalah SMA Negeri 7 Kediri. SMA Negeri 7 Kediri merupakan salah satu sekolah terfavorit di Kota Kediri dan banyak diminati oleh masyarakat di kota Kediri.

Tinjauan Pustaka

a. Administrasi Publik

Menurut Sondang Siagian (2008, h.2) Administrasi didefinisikan sebagai keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Administrasi publik menurut Chandler dan Plano yang dikutip Keban (2008, h.3) proses dimana sumberdaya dan personel publik diorganisir dan dikoordinasikan untuk memformulasikan, mengimplementasikan dan mengelola keputusan-keputusan dalam kebijakan publik.

b. Kebijakan Publik

Kebijakan publik diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai tujuan umum

atau keadaan tertentu yang dikehendaki. Istilah kebijakan dipakai untuk menunjukkan adanya pernyataan-pernyataan kehendak pemerintah mengenai tujuan-tujuan umum dari kegiatan-kegiatan yang diberlakukannya dalam suatu bidang tertentu, atau mengenai keadaan umum yang diharapkan dapat dicapai pada kurun waktu tertentu (Wahab, 2008, h.51).

Rentetan dari bentuk kebijakan publik sangat banyak. Menurut Nugroho (2011, h.104) secara sederhana dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum atau mendasar. Yakni peraturan perundangan yang terkodifikasi secara formal dan legal. Setiap peraturan dari tingkat “Pusat” atau “Nasional” hingga tingkat desa atau kelurahan dimana dalam setiap peraturan tersebut dilakukan oleh aparat publik yang dibayar oleh uang publik melalui pajak dan penerimaan Negara lainnya, dan secara hukum formal bertanggung jawab kepada publik. Dalam Undang-Undang No. 10/2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan pasal 7 mengatur jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah.

2) Kebijakan publik yang bersifat meso atau menengah, atau penjas pelaksanaan. Kebijakan ini dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Peraturan Bupati, dan Peraturan Wali Kota.

3) Kebijakan Publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya adalah peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik di bawah menteri, gubernur, bupati, dan wali kota.

c. Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Implementasi Kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam Wahab (2008, h.65), adalah:

“Memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Fokus implementasi kebijakan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat atau dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”.

2. Model-model Implementasi Kebijakan publik.

Pada dasarnya ada beberapa model implementasi kebijakan publik, di antaranya adalah (Wahab, 2008, h.71-108):

a. Model yang dikembangkan oleh Hogwood dan Gunn. Model ini kerap disebut sebagai “*the top down approach*”. Menurut Hogwood dan Gun, untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. syarat-syarat itu adalah sebagai berikut:

- 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- 2) Untuk pelaksanaan program tersebut waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- 4) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari oleh suatu hubungan kualitas yang handal. Kebijakan kadangkala tidak dapat diimplementasikan secara efektif bukan karena telah diimplementasikan secara asal-asalan, melainkan karena kebijakan tersebut didasari oleh tingkat pemahaman yang tidak memadai mengenai persoalan yang akan ditangani.
- 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- 6) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.

- 7) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- 8) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- 9) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

b. Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn. Perbedaan-perbedaan dalam proses implementasi akan dipengaruhi oleh sifat kebijakan yang akan dilaksanakan. Perubahan, control dan kepatuhan bertindak merupakan konsep-konsep penting dalam prosedur-prosedur implementasi. Van Meter dan Van Horn membuat tipologi kebijakan menurut:

- 1) Jumlah masing-masing perubahan yang akan dihasilkan
- 2) Jangkauan atau lingkup kesepakatan terhadap tujuan di antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Dari implementasi kebijakan, ada beberapa variabel-variabel yang harus diperhatikan diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Ukuran dan tujuan kebijakan. Ukuran dan tujuan-tujuan yang telah dibuat dan disepakati dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan.
- b) Sumber-sumber kebijakan. Keterseediaan sumber-sumber kebijakan meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan atau dana, dan sumber daya waktu dalam pelaksanaan kebijakan.
- c) Ciri-ciri atau sifat Badan/instansi pelaksana. Ciri atau sifat badan pelaksana kebijakan merupakan pusat perhatian oleh masyarakat khususnya dalam pelaksanaan kebijakan.
- d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan. Hubungan yang terjalin antar organisasi pelaksana kebijakan dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan.

- e) Sikap para pelaksana. Sikap para pelaksana dalam mengoperasionalkan kebijakan di lapangan.
- f) Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Lingkungan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

c. Model yang dikembangkan oleh Daniel Mazmanian dan Paul A. Sabatier, yang disebut *A Frame Work for Implementation Analysis* (kerangka analisis implementasi). Analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel-variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud diklasifikasikan menjadi tiga kategori besar yang merupakan variabel bebas (*independent variable*), terdiri dari:

- 1) Mudah tidaknya masalah yang akan dikendalikan
- 2) Kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi
- 3) Variabel-variabel di luar undang-undang, terdiri dari kondisi sosio ekonomi teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok masyarakat, dukungan dari badan-badan atau lembaga-lembaga atasan yang berwenang.

Selain adanya variabel bebas juga terdapat variabel tergantung. Tahap-tahap dalam proses implementasi (variabel tergantung) terdiri dari:

- 1) *Output* kebijakan badan-badan pelaksana.
- 2) Kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan.
- 3) Dampak nyata *output-output* kebijakan.
- 4) Persepsi terhadap dampak output kebijaksanaan.
- 5) Perbaikan (revisi) mendasar dalam undang-undang.

3. Faktor-faktor keberhasilan dan kegagalan implementasi.

Dalam Implementasi kebijakan publik dirasa penting untuk memberikan

perhatian lebih kepada peran dari kelompok-kelompok kepentingan yang bertindak sebagai pelaksana. dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan publik (Sunggono, 1994, h.140-143).

Faktor-faktor keberhasilan implementasi antara lain:

- a) Para pelaksana harus memusatkan perhatian pada problematika bagaimana mencapai konstistensi tujuan-tujuan kebijakan yang ditetapkan. Misalnya mereka harus berusaha untuk mendapatkan dukungan dari pihak-pihak yang diharapkan menerima manfaat dari kebijakan tersebut.
- b) Para pelaksana tersebut harus mampu mengubah sikap menentang dari pihak-pihak yang merasa dirugikan dari adanya kebijakan tersebut.
- c) Daya tanggap. Lembaga-lembaga publik harus tanggap terhadap perkembangan dan kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan. Menciptakan dan menjamin adanya daya tanggap yang memadai guna memungkinkan fleksibilitas, dukungan dan umpan balik selama proses implementasi suatu kebijakan publik.
- d) Tetap mengusahakan kontrol yang memadai atas distribusi sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam kebijakan publik.
- e) Kecakapan dalam “seni politik”. Keluasan wawasan dan kejelian politik dalam mempertimbangkan berbagai kemungkinan tanggapan yang muncul dari para actor yang terlibat.
- f) Pemahaman yang baik mengenai lingkungan dimana para pelaksana berusaha mewujudkan kebijakan publik.

Penilaian terhadap kebijakan Negara seringkali menunjukkan bahwa kebijakan

Negara tersebut tidak mencapai hasil yang diharapkan. Menurut Islamy (2009, h.117-118) Factor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan antara lain:

- a) Keterbatasan ketersediaan sumber-sumber, meliputi biaya, tenaga, waktu, material dan sebagainya.
- b) Kesalahan dalam pengadministrasian kebijakan-kebijakan Negara.
- c) Problema-problema publik yang timbul dari berbagai faktor.
- d) Masyarakat yang memberikan respon atau melaksanakan kebijakan dengan cara-caranya sendiri.
- e) Beberapa kebijakan Negara yang mempunyai tujuan yang bertentangan satu sama lain.
- f) Usaha-usaha untuk memecahkan beberapa masalah tertentu yang memakan biaya lebih besar dari masalah itu sendiri.
- g) Banyaknya problema-problema publik yang tidak dapat dipecahkan secara tuntas.
- h) Terjadinya perubahan sifat permasalahan ketika kebijakan sedang dirumuskan atau dilaksanakan.
- i) Adanya masalah-masalah baru yang lebih menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah-masalah yang telah ada.

d. Kebijakan Pendidikan bagi Keluarga Miskin

Salah satu rumusan mengenai tujuan pendidikan nasional dalam GBHN menurut TAP MPR Nomor II/MPR/1983 adalah dalam rangka memperluas kesempatan untuk memperoleh pendidikan, perlu dilanjutkan usaha penyediaan fasilitas pendidikan untuk menampung anak-anak usia sekolah. Usaha tersebut perlu menjangkau pula kelompok masyarakat yang karena kurang mampu, cacat, ataupun bertempat tinggal terpencil kurang dapat memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia, agar mereka mendapat kesempatan belajar dan kesempatan meningkatkan

keterampilan. Bentuk kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan untuk memberikan kesempatan pendidikan bagi siswa dari keluarga miskin adalah:

- a) Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta didik pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di Kota Kediri.
- b) Peraturan walikota Kediri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Pada TK, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB, dan SMK di Kota Kediri.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus permasalahan penelitian ini adalah:

- (1) Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin berdasarkan Perwali Nomor 27 tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri.
- (2) Faktor penghambat dan pendukung yang mempengaruhi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin berdasarkan Perwali Nomor 27 tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri.

Lokasi penelitian adalah Kota Kediri dan situs penelitian yakni Dinas Pendidikan Kota Kediri dan SMA Negeri 7 Kediri. Sumber data diperoleh dari data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif, dalam bukunya Miles dan Hubermann (1992, h.20) melalui 4 tahap yakni pengumpulan data, reduksi

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Pembahasan

Berdasarkan penelitian terkait Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan bagi Keluarga Miskin Berdasarkan Perwali Nomor 27 tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 27 Tahun 2011 jalur siswa miskin tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri. model implementasi Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2008, h.78-79) menyebutkan beberapa variabel yang harus diperhatikan. Pertama, Ukuran dan tujuan kebijakan. Tujuan dari implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jalur siswa miskin di Kota Kediri adalah untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat, memberikan kesempatan kepada masyarakat usia sekolah di Kota Kediri agar memperoleh layanan pendidikan yang sama dan berkualitas. SMA Negeri 7 Kediri menerima peserta didik baru tahun ajaran 2012-2013 sebanyak 60 siswa. Untuk memastikan apakah tujuan dari penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin tersebut benar-benar tepat sasaran, SMA Negeri 7 Kediri membentuk panitia khusus untuk melakukan verifikasi langsung ke rumah siswa miskin dan diperoleh hasil bahwa siswa miskin yang diterima sesuai dengan kriteria siswa miskin yang tertuang dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Kediri Nomor: 423.5/2224/419.42/2011.

Kedua, sumber-sumber kebijakan yang menangani kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri. Salah satu variabel dari implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2008, h.78-79) yaitu sumber-sumber kebijakan. Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan, perlu didukung oleh sumber-sumber kebijakan. Sumber-sumber kebijakan tersebut terdiri dari sumber daya manusia (SDM) yaitu dari

Pemerintah Kota Kediri, Dinas Pendidikan Kota Kediri, SMA Negeri 7 Kediri serta masyarakat Kota Kediri, sumber daya financial atau anggaran dari APBD kota Kediri dan sumber daya waktu yang telah ditentukan. sumber-sumber kebijakan sudah dipersiapkan dengan baik. Sehingga implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Ketiga, Ciri-ciri atau sifat Badan instansi pelaksana kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2008, h.79) Ciri atau sifat badan instansi pelaksana kebijakan. Ciri atau sifat badan pelaksanaan dalam pelaksanaan kebijakan penyelenggara pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri dilaksanakan secara ketat, disiplin dan demokratis dikarenakan penerimaan peserta didik baru jalur siswa miskin menggunakan sistem online dimana seluruh pihak dapat mengetahui secara langsung proses penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tersebut.

Keempat, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2008, h.79), komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan merupakan hubungan yang terjalin antar organisasi pelaksana kebijakan dalam kegiatan pelaksanaan kebijakan. Komunikasi yang terjalin antar organisasi pelaksana berjalan dengan baik. Ditambah dengan kemajuan teknologi yaitu media telepon selular dan sistem online mempermudah komunikasi dalam penyampaian informasi kepada antar anggota pelaksana kebijakan.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung terdiri dari faktor pendukung internal dan faktor pendukung eksternal. Faktor pendukung

internal yang pertama yaitu sumber daya manusia yang mumpuni. menurut pendapat Hogwood dan Gunn dalam (Wahab, 2008, h.73) untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna maka salah satu syarat yang diperlukan yaitu perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri, sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan yaitu panitia penerimaan peserta didik yang masing-masing panitia memiliki keterampilan dan kemampuan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaannya.

Kedua, penerapan sistem online. Penerapan sistem online dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin di SMA Negeri 7 Kediri sangat mendukung dalam keberhasilan implementasi kebijakan penyelenggaraan bagi keluarga miskin. Salah satu variabel bebas implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2008, h.93-95) adalah kondisi sosio, ekonomi dan teknologi. Dengan sistem online proses penerimaan peserta didik jalur siswa miskin lebih sistematis dan terbuka.

Ketiga, tersedianya dana dari pemerintah kota Kediri dalam penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri. Bantuan dari pemerintah tersebut berasal dari APBD kota Kediri. Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2008, h.88-89) salah satu variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan implementasi kebijakan adalah Ketepatan alokasi sumber-sumber dana. Hal ini menunjukkan bahwa dalam implementasi kebijakan sudah tersedia sumber daya finansial sehingga pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan dengan baik.

Keempat, Sikap para pelaksana kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2008, h.79) sikap para pelaksana yang dimaksud adalah bagaimana sikap para pelaksana dalam mengoperasionalkan kebijakan di lapangan. Para pelaksana mendukung dengan

dikeluarkannya kebijakan tersebut. Dikarenakan tujuan kebijakan adalah bersifat positif untuk pemerataan pendidikan bagi seluruh masyarakat kota Kediri khususnya untuk masyarakat golongan miskin agar memperoleh hak pendidikan yang sama.

Faktor pendukung eksternal terdiri dari yang pertama kesadaran masyarakat untuk tidak menyerobot jalur siswa miskin. masyarakat kota Kediri patuh terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah kota Kediri. Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2008, h.105) bahwa salah satu variabel dalam proses implementasi adalah kepatuhan kelompok sasaran terhadap output-output kebijakan. Hal ini ditunjukkan dengan dibentuknya panitia khusus untuk jalur siswa miskin dan didapatkan hasil bahwa seluruh siswa miskin yang diterima benar-benar sesuai dengan kriteria dari jalur siswa miskin.

Kedua, sosialisasi yang dibantu oleh media massa dan kemudahan akses internet. Salah satu variabel bebas implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2008, h.92) adalah akses formal pihak-pihak luar. Sosialisasi implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin dibantu oleh media massa yaitu internet, radio, Koran sehingga memudahkan masyarakat untuk mengetahui informasi penerimaan peserta didik khususnya jalur siswa miskin.

Ketiga, Kondisi Lingkungan Sosial, politik, dan Ekonomi yang mempengaruhi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri. Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2008, h.79) variabel implementasi kebijakan yang terakhir adalah Lingkungan ekonomi, sosial dan politik. Tidak ada pengaruh negatif dari kondisi eksternal dalam implementasi kebijakan tersebut, sehingga implementasi kebijakan dapat berjalan dengan lancar.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri tidak terlepas dari faktor penghambat yang mempengaruhinya. Adapun faktor

penghambat terdiri dari faktor penghambat internal dan eksternal. Faktor penghambat internal yang pertama adalah Keterbatasan jumlah Sumber daya Manusia (SDM). Menurut Islamy (2009, h.117-118) bahwa salah satu faktor yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan kebijakan adalah keterbatasan ketersediaan sumber-sumber. Panitia yang bertugas sebagai operator entry data siswa pendaftar hanya berjumlah 4 orang. Tidaklah cukup dengan jumlah pelaksana yang memadai untuk melaksanakan kebijakan, para pelaksana harus memiliki keterampilan-keterampilan atau kemampuan personil yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.

Kedua, belum ada kriteria standart nilai minimum untuk penerimaan jalur siswa miskin. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2008, h.79) salah satu variabel implementasi kebijakan adalah ukuran dan tujuan kebijakan. Penerimaan peserta didik jalur siswa miskin di SMA Negeri 7 Kediri dan Sekolah lainnya di Kota Kediri belum menggunakan standart nilai minimum, tetapi menggunakan syarat atau kriteria yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala dinas Pendidikan Kota Kediri. Peserta jalur siswa miskin dapat diterima walaupun dengan nilai yang sangat rendah. Hal ini mengakibatkan terdapat beberapa siswa jalur siswa miskin tidak bisa mengikuti pelajaran yang diberikan sekolah.

Ketiga, pengalokasian dana yang tidak tepat waktu. Menurut pendapat Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab, 2008, h.92) salah satu variabel dalam implemetasi kebijakan adalah Ketepatan alokasi sumber-sumber dana. Dana merupakan salah satu factor penentu dalam program pelayanan masyarakat apapun. Walaupun pengalokasian dana mengalami hambatan, namun implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri tetap berjalan. Faktor eksternal yang menghambat pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jalur siswa miskin di SMA Negeri 7 Kediri adalah pendaftaran siswa miskin yang kurang terorganisir dengan baik. Menurut pendapat Van Meter dan Van Horn dalam (Wahab, 2008, h.79) salah satu

variabel dalam implemetasi kebijakan adalah sikap para pelaksana dalam mengoperasionalkan kebijakan. Sikap para pelaksana dalam mengoperasionalkan kebijakan kurang terkoordinasi dengan baik. Pelaksanaan penerimaan peserta didik baru jalur siswa miskin dilaksanakan di masing-masing sekolah, sehingga dikhawatirkan rawan dalam hal ferivikasi peserta didik jalur siswa miskin.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin berdasarkan Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Walaupun terdapat faktor penghambat namun hal tersebut tidak menyebabkan pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tidak berjalan.

Kesimpulan

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin berdasarkan Perwali Nomor 27 Tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ukuran dan tujuan kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin yang tercapai. Ketersediaan sumber-sumber kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin, ciri-ciri atau sifat badan instansi pelaksana kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin secara disiplin, ketat dan demokratis, komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin yang berjalan dengan baik. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin memberikan hasil sesuai dengan tujuan kebijakan yaitu untuk memberikan pelayanan pendidikan yang merata dan berkualitas khususnya bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau miskin. Sebanyak 60 siswa miskin diterima di SMA

Negeri 7 Kediri. Berdasarkan data pokok pendidikan kota Kediri tahun 2012 Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SMP/MTs dan SMA/SMK/MA meningkat. Khususnya untuk jenjang SMA/SMK/MA tidak ada laporan mengenai siswa putus sekolah dikarenakan faktor ekonomi atau biaya pendidikan.

Implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin berdasarkan Perwali Nomor 27 tahun 2011 dan Perwali Nomor 19 tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik jalur siswa miskin tahun ajaran 2012/2013 di SMA Negeri 7 Kediri terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung internal yaitu sumber daya manusia yang mumpuni, penerapan sistem online, tersedianya dana dari pemerintah kota Kediri serta sikap para pelaksana kebijakan yang mendukung kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin. Faktor pendukung eksternal yaitu kesadaran masyarakat untuk tidak memanfaatkan jalur siswa miskin, sosialisasi penerimaan peserta didik yang dibantu media massa dan kemudahan akses internet serta kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi yang mendukung

implementasi kebijakan penyelenggaraan pendidikan bagi keluarga miskin di SMA Negeri 7 Kediri. Selain faktor pendukung juga terdapat faktor penghambat. Faktor penghambat internal yaitu sumber daya manusia (SDM). Sumber daya manusia yang dimiliki oleh SMA Negeri 7 Kediri masih sedikit yang memahami teknologi. Selain SDM kendala internal yang dialami SMA Negeri 7 Kediri adalah belum ada kriteria standart nilai minimum untuk penerimaan peserta jalur siswa miskin menimbulkan masalah baru bagi SMA Negeri 7 Kediri dimana salah satu siswa jalur siswa miskin keluar dikarenakan tidak bisa mengikuti pelajaran yang diberikan. Kendala internal yang terakhir adalah pengalokasian dana yang tidak tepat waktu atau terlambat. Sedangkan kendala eksternal yaitu pendaftaran penerimaan peserta didik jalur siswa miskin yang kurang terkoordinasi dengan baik. Pendaftaran penerimaan peserta didik baru jalur siswa miskin kurang terkoordinasi dengan baik dikarenakan pendaftaran dilakukan di masing-masing sekolah, sehingga dikhawatirkan rawan dalam hal verifikasi data siswa miskin.

Daftar pustaka

- Amiludin, La Ode. (2007) **Evaluasi Output Kebijakan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada Sekolah Dasar di Kabupaten Buton**. Vol. II, pp. 45. [Internet]. Available from: <<http://isjd.pdii.lipi.go.id/index.php/Search.html?act=tampil&id=58933&idc=28>> [accessed 6 November 2012]
- Dinas Pendidikan Kota Kediri (2012) Data Pokok Pendidikan Kota Kediri 2012.
- Islamy, Irfan. (2009) **Prinsip-prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara**. Jakarta, Bumi Aksara.
- Keban, Yeremias T. (2008) **Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu**. Yogyakarta, Gaya Media.
- Dinas Pendidikan Kota Kediri (2008) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Kediri 2008.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1992) **Analisis Data Kualitatif: Penerjemah Tjetjep Rohendi R.**, Universitas Indonesia Press.
- Nugroho, Riant. (2011) **Public Policy: Dinamika Kebijakan-Analisis Kebijakan-Manajemen Kebijakan**. Jakarta, PT Gramedia.
- Siagian, Sondang. (2008) **Filsafat Administrasi**. Jakarta, PT Bumi Aksara.
- Soyomukti, Nurani. (2008) **Metode Pendidikan Marxis Sosialis**. Jogjakarta.
- Sunggono, Bambang. (1994) **Hukum dan Kebijaksanaan Publik**. Jakarta, Sinar Grafika.
- Wahab, Solichin Abdul. (2008) **Pengantar Analisis Kebijakan Publik**. Malang, UMM Press.